BPBD KOTA CILEGON

PERUBAHAN RENCANA KERJA TAHUN 2023

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA CILEGON

Jl. Teuku Cik Ditiro No. 164 Kel.Sukmajaya
Kec.Jombang Kota Cilegon 42416

KOTA CILEGON

T.A 2023

WALI KOTA CILEGON
PROVINSI BANTEN

KEPUTUSAN WALI KOTA CILEGON

NOMOR : 051/Kep.343-Bappedalitbang/2023

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

WALI KOTA CILEGON,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan kondisi dan perkembangan saat ini yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah, kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, dan/atau pergeseran kegiatan antar Perangkat Daerah serta untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 367 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);

2.Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

7. Peraturan ...

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
12. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 7 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Cilegon Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Cilegon Tahun 2010 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cilegon Nomor 92);
13. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Cilegon Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Cilegon Tahun 2021 Nomor 7);

14. Peraturan ...

14. Peraturan Wali Kota Cilegon Nomor 29 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kota Cilegon Tahun 2023 Nomor 29);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023, dengan uraian tercantum dalam Lampiran Keputusan Wali Kota ini.

KEDUA : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dilaksanakan terhadap dokumen pada:

a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
b. Dinas Kesehatan;
c. Rumah Sakit Umum Daerah;
d. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
e. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
f. Dinas Satuan Polisi Paramong Praja;
g. Dinas Sosial;
h. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
i. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
j. Dinas Tenaga Kerja;
k. Dinas Perhubungan;
l. Dinas Lingkungan Hidup;
m. Dinas Kependudukan dan Pencataan Sipil;
n. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
o. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
p. Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata;
q. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;

r.Badan ...

r. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

s. Inspektorat;

t. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan;

u. Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah;

v. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;

w. Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah;

x. Dinas Perindustrian dan Perdagangan;

y. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian;

z. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian;

aa. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

bb. Sekretariat Daerah;

cc. Kecamatan Jombang;

dd. Kecamatan Purwakarta;

ee. Kecamatan Cilegon;

ff. Kecamatan Citangkil;

gg. Kecamatan Grogol;

hh. Kecamatan Cibeber;

ii. Kecamatan Ciwandan; dan

jj. Kecamatan Pulomerak.

KETIGA : Dokumen Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 menjadi pedoman bari Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Perubahan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2022.

KEEMPAT : Isi dan uraian Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU memuat konsep dan Rencana Kegiatan Perangkat Daerah dalam kerangka perencanaan strategis yang akan dilaksanakan selama periode tahun 2023.

KELIMA ...

KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cilegon
pada tanggal 19 September 2023
WALI KOTA CILEGON,

HELLDY AGUSTIAN

Tembusan :
1. Yth. Ketua DPRD Kota Cilegon
2. Yth. Inspektur Kota Cilegon

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT, atas rahmat dan ridho-Nya penyusunan Dokumen Perubahan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Cilegon Tahun 2023 akhirnya dapat diselesaikan.

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Cilegon Tahun 2023 sebagai upaya perwujudan Visi dan Misi Badan Penanggulangan Bencana Daerah mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah dan 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Perubahan Rencana Kerja (Renja) merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2021-2026.

Perubahan Rencana Kerja (Renja) ini berisikan rencana program dan rencana kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2023, dan akan menjadi pedoman bagi seluruh aparat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Cilegon dalam melaksanakan tugasnya di Tahun 2023.

Cilegon, Agustus 2023
Plt. Kepala Pelaksana
BPBD Kota Cilegon

Drs. AGUS UBAIDILLAH, MM
NIP. 19720808 200212 1 007

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1. Latar Belakang 1

1.2. Landasan Hukum 2

1.3. Maksud dan Tujuan 3

1.4. Sistematika Penulisan 4

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN 5

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja BPBD Tahun Lalu dan Capaian Renstra BPBD ... 5

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan BPBD 15

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BPBD 17

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal Perubahan RKPD 21

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 33

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH 34

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Propinsi 34

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja BPBD 39

3.3. Program dan Kegiatan BPBD 41

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 45

BAB V PENUTUP 55

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan merupakan suatu proses multidimensional yang menyangkut perubahan- perubahan penting dalam struktur, sistem sosial, ekonomi dan sikap masyarakat. Pembangunan dilaksanakan melalui proses perencanaan kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dengan mendayagunaan sumber daya yang ada secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan yaitu peningkatan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu diperlukan koordinasi untuk mensinergikan dan mengharmoniskan berbagai urusan dan tugas tersebut yang termuat dalam Perubahan Rencana Kerja 2023.

Sebagaimana diatur dalam pasal 99 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. disebutkan bahwa Perubahan Rencana Kerja membuat rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah, rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif, yang bersumber dari APBD.P maupun sumber-sumber lain yang di tempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Perubahan Rencana Kerja merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang digunakan sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan tahunan bagi seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam menyusun Rencana Kerja Perubahan.

Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Perubahan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah, adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Tahun 2023 dalam rangka Penyusunan Perubahan Renja Tahun 2023 ini mendasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain :

1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1999 Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab keuangan Negara;
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
7. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor

86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari Penyusunan Perubahan Rencana Kerja ini adalah sebagai panduan dalam perencanaan program/kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan (RKA.P) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Cilegon tahun 2023.

Sedangkan tujuan disusunnya Dokumen Perubahan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah untuk memasukkan program/kegiatan yang ada di Rencana Kerja Perubahan kedalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun 2023. Selain dari pada itu, sebagai motivasi untuk mewujudkan peningkatan kerja sesuai dengan tugas dan fungsi dalam penjabaran yang ditetapkan di dalam Rencana Strategis tahun 2021-2026 yang telah ditetapkan sebagai kinerja tahunan.

1.4. Sistematika Penulisan

Secara garis besar, sistematika isi Perubahan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Cilegon adalah sebagai berikut:

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

- **1.1.** Latar Belakang
- **1.2.** Landasan Hukum
- **1.3.** Maksud dan Tujuan
- **1.4.** Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD PD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

- **2.1.** Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD
- **2.2.** Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
- **2.3.** Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
- **2.4.** Review Terhadap Rancangan Awal Perubahan RKPD
- **2.5.** Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- **3.1.** Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- **3.2.** Tujuan dan Sasaran Renja SKPD
- **3.3.** Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Perubahan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Pada Bab ini akan dibahas pencapaian kinerja tahun 2023 samapi TW II, dan progress pencapaian kinerja dalam RENSTRA periode tahun 2021-2026 sehingga dapat teridentifikasi sampai sejauh mana Badan Penanggulangan Bencana Daerah melaksanakan program dan kegiatannya.

Evaluasi kinerja tahun 2023 tercantum dalam table di bawah ini. Perkiraan pencapaian kinerja Tahun 2023 belum dapat dikaitkan dengan pencapaian target pencapaian kinerja tahunan dalam Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2021-2026, dikarenakan Perubahan Rencana Kerja 2023 masih dalam tahun berjalan. Untuk lebih jelasnya uraian mengenai evaluasi pelaksanaan Perubahan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) kota Cilegon akan disajikan dalam tabel, sebagai berikut :

Tabel 2.1

REKAPITULASI HASIL EVALUASI PELAKSANAAN PERUBAHAN RENJA OPD S/D TAHUNBERJALAN BPBD KOTA CILEGON TAHUN 2023

Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja P rogram (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil ProgramDan Keluaran Kegiatans/d. Tahun2021 (n-3)	Target Dan Realisasi Kinerja Program Dan Keluaran KegiatanSKPD s/d.2022 (Tahun lalu / n-2)			Target Program / Kegiatan Renja SKPD Tahun 2023 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program / Kegiatan RenstraSKPD s/d. 2023	
				Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2	3	4	5	6	7	8 = 7 / 6	9	10 = (5 + 7 + 9)	11 = 10 / 9
URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG									
Administrasi Pemerintahan									
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Nilai Lakip PD** **Indeks RBPerangkat Daerah**								
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Nilai Lakip PD**								
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dok	3 Dok	3 Dok	3 Dok	100%	3 Dok	2 Dok	66,66%
Koordinasi dan Penyusunan Dok. RKA -SKPD	Keluaran : Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	100%	1 Dok	0 Dok	0%

Koordinasi dan Penyusunan Dok. Perubahan RKA-SKPD	Keluaran : Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	100%	1 Dok	0 Dok	0%
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Keluaran : Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	100%	1 Dok	0 Dok	0%
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Keluaran : Jumlah Dokumen Perubahaan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	100%	1 Dok	0 Dok	0%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Keluaran : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Ikhtisar Kinerja SKPD	2 Laporan	0 Dok	3 Dok	3 Dok	100%	2 Dok/ Laporan	2 Dok/Laporan	100%
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Keluaran : Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	0 Dok	2 Dok	2 Dok	100%	3 Laporan	0 Laporan	0%
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Nilai Lakip PD**								
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Keluaran : Jumlah orang yang gaji dan Tunjangan ASN	12 OB	12 OB	12 OB	12 OB	100%	12 OB	6 OB	50,00%
Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Keluaran : Jumlah Bendahara yang Menerima Honorarium Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Penguji/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Pejabat Penatausahaan Keuangan yang Menerima Honorarium Jumlah Pengguna ANggaran yang Menerima Honorarium	12 OB	12 OB	12 OB	12 OB	100%	12 OB	6 OB	50,00%

Koordinasi dan Penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD	Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusuan Laporan Keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD	3 Dok/ Laporan	3 Dok	3 Dok	3 Dok	100%	3 Dok	1 Dok/Laporan	33,34%
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**Nilai Lakip PD**								
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Keluaran : Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Pengurus Barang Pembantu yang Menerima Honorarium Jumlah Pengurus Barang yang Menerima Honorarium	1 Laporan	12 OB	12 OB	12 OB	100%	12 OB	0 Laporan	0 %
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Indeks RB Perangkat Daerah**								
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Keluaran : Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan		65 Stel				3 Jenis	3 Jenis	100%
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Keluaran : Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegaawaian	1 Dok		1 Dok	1 Dok	100%	1 Dok	0 Dok	0%
Koordinasi dan pelaksanaan sistem informasi kepegawaian	Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dok		1 Dok	1 Dok	100%	1 Dok	0 Dok	0%
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Keluaran : Jumlah Dokumen Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dok		1 Dok	1 Dok	100%	1 Dok	0 Dok	0%
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Keluaran : Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan						4 Orang	0 Orang	0%
Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Nilai Lakip PD**								

Penyediaan komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	1 Paket	0 paket	0 %
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	Keluaran : Jumlah Jenis Perlengkapan Kantor yang disediakan Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	25 Paket	25 Jenis	25 Jenis	25 Jenis	100%	1 Paket 25 Jenis	1 Paket 0 Jenis	25,00%
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Keluaran : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	9 Paket	9 Jenis	9 Jenis	9 jenis	100%	1 Paket	0 paket	0%
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	12 Paket	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	1 Paket	0 Paket	0%
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	8 Paket	8 Jenis	8 Jenis	8 Jenis	100%	1 Paket	1 Paket	0%
Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan perundang-undangan	Keluaran : Jumlah bahan bacaaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	6 Dok	6 Jenis	6 jenis	6 Jenis	100%	1 Dok	0 Dok	0%
Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	1 Laporan	0 laporan	0%
Fasilitas Kunjungan Tamu	Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	1 Laporan	0 Laporan	0%

Pengadaaan BMD Penunjang urusan Pemerintah Daerah	**Nilai Lakip PD**								
Pengadaan Mebel	Keluaran : Jumlah paket mebel yg disediakan	10 Unit	10 Unit	10 Unit	10 Unit	100%	0 Unit	0 Unit	100%
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Keluaran : Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	3 Unit	3 Unit	3 Unit	3 Unit	100%	3 Unit	0 Unit	0%
Penyediaan Jasa P enunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Nilai Lakip PD**								
Penyediaan jasa surat menyurat	Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	600 Lembar	600 Lembar	600 Lembar	100%	1 Laporan	0 Laporan	0%
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	12 Laporan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Laporan	6 Laporan	50,00%
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang tersedia	12 Laporan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Laporan	6 Laporan	50,00%
Pemeliharaan Baranag Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Nilai Lakip PD**								
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	5 Unit	24 Unit	24 Unit	24 Unit	100%	4 Unit	0 Unit	0 %
Penyedia Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasiaonal atau Lapangan yang dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	19 Unit					19 Unit	0 Unit	0 %
Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Keluaran : Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	5 Unit	5 Jenis	5 Jenis	5 Jenis	100%	7 Unit	1 Unit	7,00%

Pemeliharaan /Rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Keluaran : Jumlah gedung kantor dan Bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	100%	2 Unit	0 Unit	0%
PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	**1. Persentase Masyarakat diwilayah rawan bencana yang mendapat info kebencanaan** **2. Persentase masyarakat di wilayah rawan bencana yang mendapatkan pelyanan pencegahan dan kesiapsiagaan** **3. Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana**								
Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	**Persentase Masyarakat diwilayah rawan bencana yang mendapatkan info kebencanaan**								
Penyusunan Kajian Risiko Bencana kab/kota	Keluaran : Dokumen Kajian Risiko Bencana yang Dilegalisasi	1 Dok	0 Dok	1 Dok	0 Dok	0%	1 Dok	0 Dok	0%
Sosialisasi,Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana kab/kota	Keluaran : Jumlah Orang yang mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana kab/kota (per jenis bencana) secara tatap muka kepda penduduk yang tinggal daerah rawan bencana sesuai jenis ancaman yang ada dikawasan tempat tinggalnya	100.000 orang	0 orang	443803 orang	443803 orang	100%	100.000 orang	0 orang	0%
Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap bencana	**Persentase masyarakat di wilayah rawan bencana yang mendapatkan pelyanan pencegahan dan kesiapsiagaan**								
Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana kabupaten/kota	Keluaran : Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana yang Dilegalisasi	1 Dok	0 Dok	0 Dok	0 Dok	100%	0 Dok	0 Dok	0%
Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Keluaran : Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	44 Orang	40 orang	40 orang	40 orang	100%	40 orang	0 orang	0%

Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	1 Dok	0 unit	1 unit	0 unit	0%	0 unit	0 unit	100%
Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Keluaran : Jumlah peralatan dan perlindungan kesiapsiagaan bencana yang disediakan Jumlah peralatan Penyelamatan Diri Bagi Individu Warga Negara, Keluarga, Maupun Petugas Tersedianya Peralatan Kesiapsiagaan Bencana	3 unit	0 unit	3 unit	0 unit	0%	3 Unit	0 unit	0%
Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Keluaran : Jumlah Dokumen Analisis risiko bencana pada kegiatan pembangunan yang mempunyai risiko tinggi menimbulkan bencana	1 Dok	0	7 pemangku kepentingan	7 pemangku kepentingan	100%	5 unsur pentahelix	0 unsur pentahelix	0 %
Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Keluaran : Jumlah Kawasan yang ditingkatkan kapasitasnya dalam pencegahan dan kesiapsiagaan bencana	5 Kawasan	20 orang	20 orang	20 orang	100%	20 orang	10 orang	50%
Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Keluaran : Jumlah Koordinasi dan Evaluasi Rekonstruksi Pasca Bencana penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana	5	2 kegiatan	2 kegiatan	2 kegiata	100%	5 unsur pentahelix	0 unsur pentahelix	0 %
Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Keluaran : Jumlah Personil TRC yang dikembangkan kapasitas teknis dan manajerialnya	6 orang	0 orang	2 orang	2 orang	100%	6 orang	0 orang	100%
Penyusunan Rencana Kontijensi	Keluaran : Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi yang dilegalisasi	1 Dok	0 Dok	0 Dok	0 Dok	100%	0 Dok	0 Dok	100%

Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Keluaran : Jumlah aparatur dan masyarakat yang mengikuti Apel Siaga Jumlah aparatur dan masyarakat yang mengikuti Drill Penanggulangan Bencana Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan	300 orang	0 orang	300 orang	300 Orang	100%	300 orang	300 orang	100%
Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana	Keluaran : Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) yang dilegalisasi	1 Dok	0 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	100%	1 Dok	0 Dok	0%
Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	**Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana**								
Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	Keluaran : Jumlah Laporan koordinasi respon cepat kejadian luar biasa penyakit/wabah prioritas Presentase Penanganan Operasional Respon Cepat Kejadian Luar Biasa/KLB	1 Laporan	0%	100%	100%	100%	100 %	0%	0%
Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Keluaran : Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang ditetapkan Paling Lama 1 X 24 Jam Berdasarkan Dokumen Laporan Kaji Cepat. PresentasePenanganan Operasional Tanggap Darurat Bencana	1 Dok	100%	100%	100%	100%	100%	80%	71,14%
Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Keluaran : Jumlah Korban yang berhasil ditemukan, ditolong dan dievakuasi per jenis bencana Presentase JumlahKorban Yang Tertolong dan Terevakuasi	10 Orang	0%	100%	100%	100%	100%	5%	5,46%

Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Keluaran : Jumlah korban bencana yang mendapatkan distribusi logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana. Jumlah jenis logistikdan peralatan pendukung kebencanaan (pangan). Persentase Logistik dan Peralatan Pendukung Kebencanaan yang terdistribusi	100 Orang	100%	100%	100%	100%	100%	50%	50%
Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Keluaran : Jumlah Laporan Pelaksanaan aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana	1 Laporan	0 kegiatar	1 kegiatan	1 kegiatan	0%	1 Laporan	0 Laporan	0%
Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit	Keluaran : Sk Penetapan status darurat bencana dan SKPDB yang ditetapkan paling lama 1x24 jam berdasarkan hasil dokumen laporan investigasi KLB dan epidemiologi terpadu	100%	0%	100%	100%	100%	100%	0%	0%
Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana									
Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kab/Kota	Keluaran : Jumlah dokumen regulasi pendukung penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah	1 Dok	0	0	0	0	0 Dok	0 Dok	0%
Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	Keluaran : Jumlah kelembagaan bencana daerah yang dibentuk dan dikelola	1 Dok	0	0	0	0	1 Dok	1 Dok	100%
Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Keluaran : Jumlah dokumen kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam penanggulangan bencana	1 Dok	0	0	0	0	1 Dok	0 Dok	0%
Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Keluaran : Jumlah data dan informasi kebencanaan yang tersedia jumlah layanan dan informasi kebencanaan yang dikelola	1 Dok	0	0	0	0	1 Dok	0 Dok	0%
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Keluaran : Jumlah kegiatan hasil pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan penanggulangan bencana	1 Laporan	0	0	0	0	1 Laporan	0 Laporan	0%

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Khusus untuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Cilegon sampai dengan saat ini Indikator Kinerja yang ditentukan pada Rencana Strategis 2021-2026 sesuai dengan Tugas dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah serta Norma dan standar pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah lainnya yang berkaitan.

Berikut tabel Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Cilegon tahun anggaran 2022 :

TABEL 2.2

REKAPITULASI PENCAPAIANKINERJA PELAYANAN TAHUN 2021

NO	Indikator	SPM/standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2021 (thn n-2)	Tahun 2022 (thn n-1)	Tahun 2023 (tnn n)	Tahun 2024 (thn n+1)	Tahun 2021 (thn n-2)	Tahun 2022 (thn n-1)	Tahun 2023 (tnn n)	Tahun 2024 (thn n+1)	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13
1	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Pelayanan Informasi Bencana Kabupaten/Kota	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	-	100%	100%	100%	100%	96%	82,65%	100%	100%	
2	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	-	100%	100%	100%	100%	86%	90%	100%	100%	
3	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Cilegon.

Sebelum dapat menentukan isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Cilegon, terlebih dahulu harus di ketahui permasalahan apa saja yang dihadapi oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah, yaitu :

Lingkungan Internal

Faktor-faktor lingkungan internal adalah segala sesuatu yang ada di dalam organisasi yang secara langsung berpengaruh terhadap kegiatan organisasi. Faktor lingkungan internal terdiri dari aspek operasional yang meliputi sistem dan prosedur kerja, fungsi manajemen, sarana dan prasarana, keuangan serta teknologi yang diperlukan SKPD. Faktor internal akan memberikan kekuatan (strengths) dan kelemahan (weakness) pada organisasi. Adapun hasil identifikasi faktor internal adalah :

Kelemahan *(Weakness)*

1. Koordinasi antar instansi dan unit kerja belum terpadu;
2. Kurangnya SDM aparatur terampil dalam Penanggulangan Bencana;
3. Kurangnya peralatan dan logistik untuk penanggulangan bencana;
4. Wewenang perencanaananggaran untuk kebencanaan yang kurang jelas;
5. Kurangnya standarisasi penanggulangan bencana;
6. Pola penyampaian informasikegiatan penanggulangan bencana belum baku;
7. Sistem Peringatan Dini Kebencanaan belum memadai.

Kekuatan *(Strenght)*

1. Adanya Peraturan-Peraturan hukum dalam Penanggulangan Bencana;
2. Adanya Struktur dan unsur organisasi BPBD;
3. Adanya pegawai di BPBD;
4. Memiliki Pusat pengendali operasi penanggulangan bencana;
5. Adanya anggaran untuk BPBD;

6. Adanya dukungan peratan dan perlengkapan kantor.

Lingkungan Eksternal

Merupakan faktor-faktor di luar organisasi yang secara langsung maupun tidak langsung dapat mempengaruhi kemampuan organisasi yang meliputi aspek ekonomi, sosial budaya, keamanan dan teknologi. Faktor eksternal inilah yang akan memberikan peluang (opportunity) tapi juga memunculkan tantangan (threats).

Ancaman/tantangan*(Threats)*

1. Keberadaan industri baja dan kimia, gunung Krakatau dan kawasan pantai serta laut serta banyaknya lahan kritis rawan bencana;
2. Berpotensi rawan bencana dilihat dari kondisi hidrologis, geografis, geologis, morfologis, topografisdandemografis;
3. Perumusan/penetapan kebijakan operasional penanggulangan bencana dari pusat belum lengkap;
4. Pedoman operasional (SOP) penanggulangan bencana belum lengkap, belum baku dan terdokumentasikan sebagai standar kerja di kabupaten/Kota;
5. Sumber dana dan sarana pendukung operasional relative kecil dan belum diketahui pasti jumlah dan potensinya;
6. Hardware dan software tekonologi informasi kebencanaan belum memadai;
7. Sistem monitoring dan evaluasi kegiatan belum baku;
8. Sulitnya menjangkau daerah rawan bencana;
9. Peraturan perundanganyang sering mengalami perubahan;
10. Belum memadainya kinerja dan kapasitas SDM aparat penanggulangan bencana pada sebagian besar SKPD dan instansi yang terkait di Kota Cilegon, terutama dilihat dari sisi pengetahuan dan kecakapan penanggulangan;
11. Belum optimalnya koordinasi antara Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Cilegon dengan lintas sektoral (antara instansi dan SKPD terkait) dalam penanggulangan bencana;
12. Masih kurangnya pengetahuan masyarakat tentang tata cara penanggulangan bencana daerah;

13. Adanya perubahan iklim global yang akan menambah intensitas bencana alam di semua wilayah;
14. Masih terbatasnya sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Peluang *(Opportunities)*

1. Dukungan pemerintah Kota Cilegon cukup kuat dan baik;
2. Besarnya jumlahpenduduk yang berpotensi dalam partisipasi masyarakat;
3. Peluang pengembangan jaringan kegiatan terbuka;
4. BNPB dan Pemerintah Kota Cilegon sebagai Pembina dan pendukung kegiatan penanggulangan bencana;
5. SDM cukup berpengalaman dibidang administrasi;
6. Stabilitas keamanan, social dan politik regional baik dan stabil;
7. Mudahnya akses koordinasi vertical dengan BPBD di provinsidan BNPB pusat;
8. Motivasi dan keseriusan pegawai dan pimpinan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Cilegon untuk mewujudkan Good governance;
9. Kesempatan pengembangan kualitas aparatur perencana melalui pendidikan dan pelatihan baik di tingkat Pusat, Propinsi maupun Kabupaten/Kota;
10. Akses dan perkembangan teknologi informasi yang berkembang pesat, mempermudah proses dan pelaksanaan kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Cilegon;
11. Adanya komitmen pendanaan yang memadai dan fleksibel bagi upaya penyelenggaraan penanggulangan bencana dari pos belanja tak terduga (Dana TT) APBD Kota Cilegon;
12. Adanya komitmen dari seluruh lapisan masyarakat dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana termasuk TNI dan Polri;
13. Adanya sinkronisasi kegiatan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;
14. Adanya peran serta masyarakat, relawan, Ormas dan LSM dalam upaya penanggulangan bencana.

Setelah kita ketahui berbagai macam permasalahan yang dihadapi oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah, maka dapat ditentukan isu-isu penting dalam penyelenggaraan sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagai berikut :

1. Belum optimalnya pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pencegahan dan penanggulangan bencana sehingga mitigasi bencana belum optimal;
2. Masih minimnya sumber daya manusia aparatur BPBD baik secara kualitas maupun kuantitas;
3. Masih minimnya pemahaman dan partisipasi masyarakat terhadap tindakan pencegahan dan penanggulangan pada saat terjadi bencana dan pasca bencana;
4. Belum optimalnya koordinasi dengan instansi terkait dalam penanggulangan bencana;
5. Perlu adanya Sistem Peringatan Dini yang terintegrasi dan belum updating jalur evakuasi didaerah resiko bencana tinggi;
6. Perlunya mengurangi potensi timbulnya percepatan kerusakan sumber daya alam dan pencemaran lingkungan dan mengurangi terjadinya intensitas bencana banjir, tanah longsor atau kekeringan dari daerah-daerah yang mengalami masalah ekologis. Seperti perubahan tata guna lahan yang tidak sesuai dengan peruntukannyadan belum terintegrasinya sistem drainase kawasan dan kurangnya kapasitas saluran sehingga tidak mampu menampung debit air limpasan, selain itu kapasitas daya tamping badan air tidak memadai.

Dengan terformulasinya isu-isu penting tersebut diatas, diharapkan akan berdampak positif terhadap visi dan Misi Walikota Kota Cilegon serta Visi dan Misi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Cilegon khususnya.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal Perubahan RKPD Tahun 2023

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Cilegon Tahun 2023 disusun dengan berpedoman kepada RPJPD dan RPJMD Kota Cilegon. Atas dasar tersebut, perlu adanya komitmen Pemerintah Kota Cilegon, dan diperlukan juga adanya peningkatan kapasitas aparatur Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang siap siaga dalam pelaksanaan penyelenggaraan tugas dan fungsinya.

Adapun perbandingan antara APBD 2023 dengan rancangan awal usulan Perubahan renjaRenja Badan Penanggulangan Bencana Daerah sesuai table sebagai berikut :

Tabel 2.4
Review Terhadap Rancangan Awal Perubahan RKPD Tahun 2023

Rancangan Awal Perubahan RKPD Tahun 2022					Hasil Analisis Kebutuhan					CATATAN PENTING
PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA (Rp)	
1	4	2	6	7	1	4	2	6	7	5
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**BPBD**	**Nilai Lakip PD, Indeks RB Perangkat Daerah**		**10.518.848.752**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**BPBD**	**Nilai Lakip PD, Indeks RB Perangkat Daerah**		**10.449.327.935**	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		**Nilai Lakip PD**		**126.585.956**	**Perencanaan, Penganggaran, dan** Evaluasi Kinerja **Perangkat Daerah**		**Nilai Lakip PD**		**69.129.956**	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan PD yang disusun	3 dok	103.589.224	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan PD yang disusun	3 dok	46,133,224	
Koordinasi dan Penyusunan Dok. RKA -SKPD		Keluaran : Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang disusun	1 dok	2.498.000	Koordinasi dan Penyusunan Dok.		Keluaran : Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang disusun	1 dok	2,498,000	
Koordinasi dan Penyusunan Dok. Perubahan RKA-SKPD		Keluaran : Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD yang disusun	1 dok	2.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Dok. Perubahan RKA-		Keluaran : Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD yang disusun	1 dok	2,000,000	
Koordinasi dan Penyusunan Dok. DPA-SKPD		Keluaran : Jumlah Dokumen DPA-SKPD yang disusun	1 dok	2.999.732	Koordinasi dan Penyusunan Dok. Perubahan DPA-SKPD		Keluaran : Jumlah Dokumen DPA-SKPD yang disusun	1 dok	2,999,732	

Koordinasi dan Penyusunan Dok. Perubahan DP A-SKPD		Keluaran : Jumlah Dokumen Perubahaan DPA-SKPD yang disusun	1 dok	2.499.000	Koordinasi dan Penyusunan Dok. Perubahan DAA-SKPD		Keluaran : Jumlah Dokumen Perubahaan DPA- SKPD yang disusun	1 dok	2.499.000	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja SKPD		Keluaran : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja PD yang disusun	2 Laporan	10.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja SKPD		Keluaran : Jumlah Dokumen Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja PD yang disusun	2 Laporan	10.000.000	
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Keluaran : Jumlah Laporan Evaluasi dan Pelaporan Data Pembangunan Sektoral	5 Laporan	3.000.000	Evaluasi Kinerja Perang kat Daerah		Keluaran : Jumlah Dokumen Evaluasi dan Pelaporan Data Pembangunan Sektoral	5 Laporan	3.000.000	
Administrasi Keuangan PD		**Nilai Lakip PD**		**6.028.692.823**	**Administrasi Keuangan PD**		**Nilai Lakip PD**		**6.028.692.823**	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Keluaran : Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	12 OB	5.939.722.823	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Keluaran : Jumlah orang.bulan ASN yang mendapat gaji dan tunjangan ASN	12 OB	4.993.682.494	
Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD		Keluaran : Jumlah PPK, Bendahara Pengeluaran, Pembantu PPK, Pembantu Bendahara	12 Org/Bulan	73.920.000	Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD		Keluaran : Jumlah PPK, Bendahara Pengeluaran, Pembantu PPK, Pembantu Bendahara	12 Org/Bulan	64.200.000	

Koordinasi dan Penyusunan lap keuangan bulanan/triwulanan/semester SKPD		Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan yang disusun (Laporan Keuangan dan Prognosis)	3 Laporan	15.000.000	Koordinasi dan Penyusunan lap keuangan bulanan/triwulanan/semester SKPD		Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan yang disusun (Laporan Keuangandan Prognosis)	3 Laporan	24.720.000	
Administrasi Barang Milik Daerah pada PD		**Nilai Lakip PD**		**18,000,000**	**Administrasi Barang Milik Daerah pada PD**		**Nilai Lakip PD**		**18,000,000**	
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Keluaran : Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	18.000.000	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Keluaran : Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	18.000.000	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		**Indeks RB Perangkat Daerah**		**377.655.871**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**		**Indeks RB Perangkat Daerah**		**380.455.871**	
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		Keluaran : Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	3 Jenis	300.655.871	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		Keluaran : Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan		303.455.871	
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		Keluaran : Jumlah Dokumen Pendataandan Pengolahan Administrasi Kepegaawaian	1 dok	2.500.000	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		Keluaran : Jumlah Dokumen Pendataandan Pengolahan Administrasi Kepegaawaian	1 dok	2.500.000	
Koordinasi dan pelaksanaan sistem informasi kepegawaian		Keluaran : Jumlah Dokumen hasil koordinasi dan pelaksanaan SistemInformasi Kepegawaian	1 dok	2.500.000	Koordinasi dan pelaksanaan sistem informasi kepegawaian		Keluaran : Jumlah Dokumen hasil koordinasi dan pelaksanaan SistemInformasi Kepegawaian	1 dok	2.500.000	

Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pega wai		Keluaran : Jumlah Dokumen Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 dok	2.000.000	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		Keluaran : Jumlah Dokumen Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 dok	2.000.000	
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Keluaran : Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	4 orang	70.000.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Keluaran : Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	4 orang	70.000.000	
Administrasi Umum PD		**Nilai Lakip PD**		**607.269.285**	**Administrasi umum PD**		**Nilai Lakip PD**		**660.519.285**	
Penyediaan komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor		Keluaran : Jumlah Komponen Listrik yang disediakan	1 Paket	9.226.498	Penyediaan komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor		Keluaran : Jumlah Komponen Listrik yang disediakan	1 Paket	9.226.498	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor		Keluaran : Jumlah Paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan Jumlah Alat Tulis Kantor yang disediakan	1 Paket 25 Jenis	320.042.787	Penyediaan Peralatan dan Perlengka pan kantor		Keluaran : Jumlah Paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan Jumlah Alat TulisKantor yang disediakan	1 Paket 25 Jenis	321.642.787	
Penyediaan Peralatan Ru mah Tangga		Keluaran : Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	1 Paket	18.000.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Keluaran : Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	1 Paket	18.000.000	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Keluaran : Jumlah Paket bahan logistik kantor yang disediakan	1 Paket	100.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Keluaran : Jumlah Paket bahan logistik kantor yang disediakan	1 Paket	101.650.000	
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan		Keluaran : Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	1 paket	25.000.000	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan		Keluaran : Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	1 paket	25.000.000	
Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan perundang-undangan		Keluaran : Jumlah Dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	1 Dokumen	15.000.000	Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan perundang-undangan		Keluaran : Jumlah Dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	1 Dokumen	15.000.000	

Fasilitas Kunjungan Tamu		Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi kunjungan tamu	1 Laporan	20.000.000	Fasilitas Kunjungan Tamu		Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi kunjungan tamu	1 Laporan	20.000.000	
Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD		Keluaran : Jumlah Laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	1 Laporan	100.000.000	Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD		Keluaran : Jumlah Laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	1 Laporan	150.000.000	
Pengadaaan BMD Penunjang urusan PD		**Nilai Lakip PD**		**616.120.353**	**Pengadaaan BMD Penunjang urusan PD**		**Nilai Lakip PD**		**620.120.353**	
Pengadaan Mebel		Keluaran : Jumlah mebel yg tersedia	0 unit	0	Pengadaan Mebel		Keluaran : Jumlah mebel yg tersedia	0 unit	0	
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan mesinlainnya yang tersedia	3 unit	616.120.353	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Keluaran : Jumlah Peralatan dan mesin lainnya yang tersedia	3 unit	620.120.353	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan PD		**Nilai Lakip PD**		**2.119.465.567**	**penyediaan Jasa Penunjang Urusan PD**		**Nilai Lakip PD**		**2.119.465.567**	
Penyediaan jasa surat menyurat		Keluaran : Jumlah Laporan penyediaan jasa surat menyurat	1 Laporan	6.000.000	Penyediaan jasa surat menyurat		Keluaran : Jumlah Laporan penyediaan jasa surat menyurat	1 Laporan	6.000.000	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Keluaran : Jumlah JasaKomunikasi (Telp, Internet), Jasa Penyediaan listrik, Pubiikasi/tayang pada media promosi dan Propaganda yang tersedia	12 Bulan	223.862.127	Penyediaan Jasa Ko munika si, Su mber Daya Air dan Listrik		Keluaran : Jumlah Jasa Komunikasi (Telp, Internet), Jasa Penyediaan listrik, Pubiikasi/tayang pada media promosi dan Propaganda yang tersedia	12 Bulan	223.862.127	

Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Keluaran : Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor yang tersedia	12 Bulan	1.889.603.440	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Keluaran : Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor yangtersedia	12 Bulan	1.889.603.440	
Pemeliharaan Baranag Milik Daerah Penunjang Urusan PD		**Nilai Lakip PD**		**625.058.897**	**Pemeliharaan Baranag Milik Daerah Penunjang Urusan PD**		**Nilai Lakip PD**		**551.944.080**	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Keluaran : Jumlah Kendaraan perorangan atau Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	4 Unit	165.210.600	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Keluaran : Jumlah Kendaraan perorangan atau Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	4 Unit	166.160.600	
Penyedia Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasiaonal atau Lapangan yang dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	19 Unit	278.441.402	Penyedia Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasiaonal atau Lapangan yang dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	19 Unit	279.391.402	
Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya		Keluaran : Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	7 Unit	58.797.000	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya		Keluaran : Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	7 Unit	68.797.000	
Pemeliharaan /Rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya		Keluaran : Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yangdipelihara/ direhabilitasi	2 Unit	122.609.895	Pemeliharaan /Rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya		Keluaran : Jumlah gedung kantor dan Bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 Unit	37.595.078	

PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH		**1. Persentase Masyarakat diwilayah rawan bencana yang mendapat info kebencanaan 2. Persentase masyarakat di wilayah rawan bencana yang mendapatkan pelyanan pencegahan dan kesiapsiagaan 3. Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana**		**2.894.145.437**	**PROGRAM PEN ANG GUL AN GA N BENCANA DAERAH**		**1. Persentase Masyarakat diwilayah rawan bencana yang mendapat info kebencanaan 2. Persentase masyarakat di wilayah rawan bencana yang mendapatkan pelyanan pencegahan dan kesiapsiagaan 3. Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana**		**2.745.829.017**	
Pelayanan Informasi RawanBencana kab/kota		**Persentase Masyarakat diwilayah rawan bencana yang mendapat info kebencanaan**		**279.989.272**	**Pelayanan InformasiRawan Bencana**		**Persentase Masyarakat diwilayah rawan bencana yang mendapat info kebencanaan**		**306.489.272**	
Penyusunan Kajian Risiko Bencana kab/kota		Keluaran : Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana Jumlah Koordinasi perkuatan data dan informasi per resiko	1 dok 1 kegiatan	179.989.272	Penyusunan Kajian Risiko Bencana kab/kota		Keluaran : Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana Jumlah Koordinasi perkuatan data dan informasi per resiko	1 dok 1 kegiatan	206.489.272	
Sosialisasi,Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana kab/kota		Keluaran : Jumlah Penduduk dikawasan Rawan Bencana yang Memperoleh Informasi Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman Bencana Jumlah media informasi bencana	1 Kegiatan 3 Jenis	100.000.000	Sosialisasi,Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana kab/kota		Keluaran : Jumlah Penduduk dikawasan RawanBencana yang Memperoleh Informasi Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman Bencana Jumlah media informasi bencana	1 Kegiatan 3 Jenis	100.000.000	

Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap bencana		**Persentase masyarakat di wilayah rawan bencana yang mendapatkan pelyanan pencegahan dan kesiapsiagaan**		**999.966.005**	**Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap bencana**		**Persentase masyarakat di wilayah rawan bencana yang mendapatkan pelyanan pencegahan dan kesiapsiagaan**		**610.358.585**	
Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana kabupaten/kota		Keluaran : Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana yang Dilegalisasi	0 dok	0	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana kabupaten/kota		Keluaran : Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana yang Dilegalisasi	0 dok	0	
Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota		Keluaran : Jumlah masyarakat yang ikut pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	40 orang	75.000.000	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota		Keluaran : Jumlah masyarakat yang ikut pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	40 orang	75.000.000	
Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota		Keluaran : Jumlah Sarpras Operasional Kesiapsiagaan Bencana yang disediakan	0 unit	0	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota		Keluaran : Jumlah Sarpras Operasional Kesiapsiagaan Bencanayang disediakan	0 unit	0	
Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana		Keluaran : Jumlah Peralatan dan perlindungan kesiapsiagaan bencana Jumlah Peralatan Penyelamatan diribagi individu, warga negara, keluarga maupun petugas Tersedianya peralatan kesiapsiagan bencana	10 unit 31 unit 2 unit	70.000.000	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana		Keluaran : Jumlah Peralatan dan perlindungan kesiapsiagaan bencana Jumlah Peralatan Penyelamatan diribagi individu, warga negara, keluarga maupun petugas Tersedianya peralatan kesiapsiagan bencana	10 unit 31 unit 2 unit	70.000.000	

Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota		Keluaran : Jumlah koordinasi dengan pemangku kepentingan (Penguatan Perkuatan data Kelembagaan dan Regulasi)	5 unsur Kepentingan (PENTAHELIX)	50.000.000	Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota		Keluaran : Jumlah koordinasi dengan pemangku kepentingan (Penguatan Perkuatan data Kelembagaan dan Regulasi)	5 unsur Kepentingan (PENTAHELIX)	50.000.000	
Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan		Keluaran : Jumlah Orang yang melaksanakan Pengamanan Hari Raya(Hari Besar Islam dan Hari Besar Nasional)	20 Orang	50.000.000	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan		Keluaran : Jumlah Orang yang melaksanakan Pengamanan Ha ri Raya(Hari Besar Islamdan Hari Besar Nasional)	20 Orang	44.925.080	
Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota		Keluaran : Jumlah koordinasi dan evaluasi rekonstruksi pasca bencana,penanganan rehabilitasi dan rekontruksi pasca bencana	5 unsur Kepentingan (PENTAHELIX)	30.000.000	Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota		Keluaran : Jumlah koordinasi dan evaluasirekonstruksi pasca bencana,penanganan rehabilitasi dan rekontruksi pasca bencana	5 unsur Kepentingan (PENTAHELIX)	30.000.000	
Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota		Keluaran : Jumlah Satgas Penanganan dan Mitigasi Bencana	6 Orang	169.150.489	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota		Keluaran : Jumlah Satgas Penanganan dan Mitigasi Bencana	6 Orang	9.000.489	
Penyusunan Renc ana Kontijensi		Keluaran : Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi yang disusun	0 Dok	0	Penyusunan Rencana Kontijensi		Keluaran : Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi yang disusun	0 Dok	0	
Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana		Keluaran : Jumlah aparatur dan masyarakat yang mengikuti Apel Siaga Jumlah aparatur dan masyarakat yang mengikuti Drill penanggulangan bencana Jumlah masyarakat dan sekolah dikecamatan yang mengikuti sosialisasi kesiapsiagaan bencana	250 Orang 50 Orang 4 Kecamatan	535.815.516	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana		Keluaran : Jumlah aparatur dan masyarakat yang mengikuti Apel Siaga Jumlah aparatur dan masyarakat yang mengikuti Drill penanggulangan bencana Jumlah masyarakat dan sekolah dikecamatan yang mengikuti sosialisasi kesiapsiagaan bencana	250 Orang 50 Orang 4 Kecamatan	331.433.016	

Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana		Keluaran : Jumlah koordinasi pemangku kepentingan (penguatan perkuatan data kelembagaan dan regulasi)	7 kegiatan	20.000.000	Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana		Keluaran : Jumlah koordinasi pemangku kepentingan (penguatan perkuatan data kelembagaan dan regulasi)	0 kegiatan	0	
Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana		**Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana**		**1.072.700.000**	**Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana**		**Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana**		**1.337.700.000**	
Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas		Keluaran : Presentase Penanganan Operasional Respon Cepat KLB	100%	50.000.000	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas		Keluaran : Presentase Penanganan Operasional Respon Cepat KLB	100%	50.000.000	
Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota		Keluaran : Presentase Penanganan Operasional Tanggap DaruratBencana	100%	377.700.000	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota		Keluaran : Presentase Penanganan Operasional Tanggap DaruratBencana	100%	477.700.000	
Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota		Keluaran : Presentase Jumlah Korban Yang Tertolong dan Terevakuasi Tersedianya peralatang pendukung penanganan darurat bencana	100% 7 Jenis	250.000.000	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota		Keluaran : Presentase Jumlah Korban Yang Tertolong dan Terevakuasi Tersedianya peralatang pendukung penanganan darurat bencana	100% 7 Jenis	286.000.000	
Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota		Keluaran : Jumlah bimtek pengelolaan gudang logistik Persentase Logistik dan peralatan yang terdistribusi Tersediannya sarana pendukung operasional gudang logistik BPBD Tersedianya stok logistik dan peralatan kebencanaan (pangan)	1 kegiatan 100% 1 Paket 4 Jenis	345.000.000	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota		Keluaran : Jumlah bimtek pengelolaan gudang logistik Persentase Logistik dan peralatan yang terdistribusi Tersediannya sarana pendukung operasional gudang logistik BPBD Tersedianya stok logistik dan peralatan kebencanaan (pangan)	1 kegiatan 100% 1 Paket 4 Jenis	474.000.000	

Aktivasi Sistem Komando Penanganan Da rurat Bencana		Keluaran : Tersedianya Peralatan Pendukung Penanganan Darurat Bencana	4 jenis	30.000.000	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana		Keluaran : Tersedianya Peralatan Pendukung Penanganan Darurat Bencana	4 Jenis	8.500.000	
Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit		Keluaran: Presentase Penanganan Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit	100%	20.000.000	Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit		Keluaran: Presentase Penanganan Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit	100%	20.000.000	
Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencan a				**541.490.160**	**Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana**				**491.281.160**	
Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota		Keluaran : Jumlah Kelembagaan bencana daerah yang dibentuk dan dikelola	1 Unit	140.300.000	Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota		Keluaran : Jumlah Kelembagaan bencana daerah yang dibentuk dan dikelola	1 Unit	162.800.000	
Kerja sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota		Keluaran : Jumlah Dokumen kerja sama antar lembaga dan kemitraan dalam penanggulangan becanan	1 Dokumen	88.216.146	Kerja sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota		Keluaran : Jumlah Dokumen kerja sama antar lembaga dan kemitraan dalam penanggulangan becanan	1 Dokumen	77.077.146	
Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan		Keluaran : Jumlah Data dan Informasi kebencanaan yang tersedia Jumlah layanan dan informasi kebencanaan yang dikelola	1 Dokumen 1 Kegiatan	122.974.014	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan		Keluaran : Jumlah Data dan Informasi kebencanaan yang tersedia Jumlah layanan dan informasi kebencanaan yang dikelola	1 Dokumen 1 Kegiatan	122.974.014	
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana		Keluaran : Jumlah kegiatan hasil pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan penanggulangan bencana	3 Kegiatan	190.000.000	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana		Keluaran : Jumlah kegiatan hasil pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan penanggulangan bencana	3 Kegiatan	128.500.000	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Kota Cilegon akan menambah usulan Program/Kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota (bila sudah dilakukan), Berikut adalah Tabel Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2023 di Kota Cilegon :

Usulan Program dan Kegiatan dari para Pemangku Kepentingan Tahun 2023

Kota Cilegon

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
-1	-2	-3	-4	-5	-6
		NIHIL			

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

3.1.1 Telaahan Renstra BNPB

Sejalan dengan visi dan misi BNPB, tujuan BNPB tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

1. Tercapainya pengurangan risiko bencana di daerah rawan bencana.
2. Terwujudnya penanganan darurat bencana yang cepat, tepat, efektif, dan terkoordinasi
3. Terwujudnya pemulihan wilayah pascabencana menjadi lebih baik, lebih aman dan berkelanjutan.
4. Terwujudnya tata kelola penyelenggaraan penanggulangan bencana yang profesional, akuntabel dan transparan.

Sasaran

Mengacu pada Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019, sasaran strategis Kementerian/Lembaga adalah kondisi yang akan dicapai secara nyata yang mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil satu atau beberapa program.

Sejalan dengan visi, misi, dan tujuan BNPB 2020-2024, sasaran strategis BNPB 2020 - 2024 adalah sebagai berikut :

1. Menurunnya risiko bencana di daerah rawan bencana.
2. Terselamatkannya sebanyak mungkin jiwa pada saat keadaan darurat bencana.
3. Terpulihkannya sarana dan prasarana, sosial, ekonomi dan produktivitas sumber daya alam pada daerah terdampak pascabencana.
4. Meningkatnya kualitas tata kelola penyelengaraan penanggulangan bencana yang profesional, akuntabel dan transparan.

Selanjutnya untuk mengukur keberhasilan dari sasaran strategis yang telah ditetapkan, maka ditetapkan pula indikatornya dalam format indikator kinerja sasaran strategis. Untuk lebih jelasnya indikator kinerja sasaran strategis yang digunakan dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.1.1
Indikator Kinerja Sasaran Strategis

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Satuan
1	Menurunnya risiko bencana di daerah rawan bencana.	Indeks Risiko Bencana.	indeks
2	Terselamatkannya sebanyak mungkin jiwa pada saat keadaan darurat bencana.	Rata-rata angka kematian akibat bencana saat keadaan darurat per 100.000 jiwa.	Jiwa/ 100.000 penduduk wilayah terdampak
3	Terpulihkannya sarana dan prasarana, social, ekonomi dan produktivitas sumber daya alam pada daerah terdampak pascabencana.	Rata-rata Kenaikan Indeks Pemulihan Pascabencana.	indeks
4	Meningkatnya kualitas tata kelola penyelengaraan penanggulangan bencana yang profesional, akuntabel dan transparan.	Indeks Reformasi Birokrasi.	indeks

Sinergitas pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis BNPB 2020-2024 melibatkan seluruh unit kerja BNPB dan juga didukung oleh lembaga lain baik di tingkat pusat maupun daerah. BNPB merupakan lembaga yang memiliki fungsi perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan pengoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, dan menyeluruh. Tugas BNPB pada dasarnya adalah melakukan penanggulangan bencana melalui tiga tahapan, yaitu: prabencana, keadaan darurat, dan pascabencana. Untuk menjamin tercapainya penanganan bencana yang andal, maka fungsi BNPB pada ketiga tahapan penanggulangan bencana harus didukung oleh semua sumber daya yang ada di BNPB.

3.1.2 Telaahan Renstra BPBD Propinsi Banten

Sasaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya peningkatan kemampuan SDM (Aparatur dan Masyarakat) yang menguasai teknologi di bidang penanggulangan bencana;
2. Terwujudnya standar, kebutuhan, dan prosedur penyelenggaraan penanggulangan bencana;
3. Terwujudnya Pemanfaatan teknologi pencegahan, kesiapsiagaan, peringatan dini, dan mitigasi untuk menghadapi ancaman dan resiko bencana;
4. Terwujudnya penyelenggaraan penanggulangan bencana secara terancana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh;
5. Penanganan pengungsi secara adil (sesuai standar pelayanan minimum) serta melaksanakan pemulihan kondisi dari dampak bencana;
6. Mengembangkan dan meningkatkan kemitraan dengan masyarakat, di bidang tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi akibat bencana.

Tabel 3.1.2
Telaahan Renstra BPBD Propinsi Banten

Aspek Kajian	Capaian/Kondisi Saat ini	Standar yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan BPBD
			Internal (Kewenangan BPBD)	Eksternal (Diluar Kewenang	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Penanganan Pra bencana	Masih rendahnya pengetahuan masyarakat dalam pengurangan Risiko bencana, dan pencegahan bencana	Persyaratan standar teknis penanggulangan bencana	1.Pemaduan dalam rencana pembangunan 2. Perencanaan tata ruang 3. Pemberdayaan dan peningkatan kemampuan	1.Tingkat pendidikanmasyarakatdalam menerima para digma baru	Masih dominannya peran Pemerintah dan peranan luar komunitas Disbanding dengan tim siaga bencana dari dalam Komunitas sendiri
Penangan an saat bencana	Data awal tentang jumlah korban, kerusakan infrastruktur, sarana social sering kurang valid/masih simpang siur	Operasi penanganan darurat	1.Ilmu dan teknologi yang digunakan 2.Kerjasama dengan lembaga lain yang menangani penanggulangan bencana	1. Sarana, prasarana dan Infrastrukturmenuju kedaerah bencana 2. Kebijakan Pemerintah daerah	1.Isu gender kelompok-kelompok marjinal yang sangat rentan ketika terjadi bencana 2.Kurangnya pemanfaatan ilmu dan teknologi, perencanaan yang komprehensif dalam penanganan bencana

Penanganan Pasca bencana	Partisipasi dan Peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha,dan masyarakat masih dirasakan kurang	Rehabilitasi dan Rekonstruksi fasilitas vital	1. Lingkungan Daerah bencana 2. Masayarakat, sosial,ekonomi Dan budaya daerah bencana	Kebijakan Pemerintah Daerah dan Pusat	Masih dominannya Peran Pemerintah dan peranan luar komunitas Disbanding dengan tim siaga bencana dari dalam komunitas sendiri serta lemahnya koordinasi antar instansi.

3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Sebelum dirumuskan tujuan dan sasaran dalam Rencana Kerja ini, terlebih dahulu kami akan mengungkapkan kembali Tujuan dan Sasaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang tercantum dalam Rencana Strategis Periode 2021-2026 sebagai berikut :

Tujuan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Cilegon yang dijabarkan dari misi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Cilegon adalah :

1. Meningkatnya Kualitas Layanan Pemerintahan, Tujuan 1 ini dijabarkan kedalam sasaran, yaitu Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah dan profesionalitas aparatur.
2. Peningkatan Kualitas Pembangunan dan Kualitas Hidup Masyarakat, tujuan ke-2 ini dijabarkan dalam sasaran, yaitu meningkatnya ketangguhan bencana.

Adapun indikator tujuan yang ke-2 yaitu **Indeks Risiko Bencana**
Capaian Kinerja indikator sasaran ini didapat dari mengisi kuisioner Peringkat Penilaian Kapasitas Daerah (7 Fokus Prioritas dan 71 Indikator pencapaian) dari BNPB.

Pendekatan teknis perhitungan indeks resiko bencana didasarkan pada Peraturan Kepala (Perka) BNPB No. 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pengkajian Risiko Bencana.

Namun demikian, target pencapaian tujuan dan sasaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah untuk tahun 2023 kami rasa masih sesuai dengan kondisi nyata dan realita kebutuhan, berikut kami sajikan tujuan dan sasaran tahun 2023 :

Tabel 3.2
Tujuan dan Sasaran Tahun 2023

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN 2023
1.	Meningkatnya Kualitas Layanan Pemerintahan		Indeks Reformasi Birokrasi	poin 75,3
		Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah dan Profesionalitas Aparatur	Nilai Lakip Perangkat Daerah	poin 81,00
			Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	poin 48,00
2.	Peningkatan Kualitas Pembangunan dan Kualitas Hidup Masyarakat		Indeks Resiko bencana	Sedang (poin 125)
		Terwujudnya Stabilitas Pangan , Ketangguhan Bencana, Kondusivitas Wilayah, Kerukunan Umat Beragama dan Nilai-nilai luhur keagamaan	Persentase Masyarakat di Wilayah Rawan Bencana yang mendapatkan informasi kebencanaan	100%
			Persentase Masyarakat di Wilayah rawan bencana yang mendapatkan pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan bencana	100%
			Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	100%

3.3. Program dan Kegiatan

Maksud dari penyusunan perubahan Rencana Kerja ini adalah sebagai panduan dalam mengevaluasi pelaksanaan program/kegiatan tahun 2023, dan perencanaan program /kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan (RKA.P) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Cilegon tahun 2023 dan agar tercipta sinergitas dan sinkronisasi pelaksanaan pembangunan antar desa, antar wilayah, antar sektor pembangunan desa, serta terciptanya efektifitas dan efisiensi alokasi sumber daya dalam pembangunan daerah.

Program dan kegiatan yang diamanatkan pada Permendagri Nomor 90 Tahun 2019, Permendagri No. 101 Tahun 2018 dan Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 5 Tahun 2014. Adapun Program dan Kegiatan yang mengalami Perubahan sebagai berikut:

1. **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**, yaitu:

   a. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, di Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dari pagu awal *Rp.103.589.224* menjadi *Rp.46.133.224*, anggaran terkena Rasionalisasi belanja.

   b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;

      - Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN pagu tetap *Rp.5.939.772.823*, perubahan uraian belanja untuk TPP 13 dan TPP 14 50% diambil dari belanja gaji pokok.

      - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD dari pagu awal *Rp.73.920.000* menjadi *Rp.64.200.000* karena belanja honor pembantu bendahara tidak bisa direalisasi dan anggaran dialihkan ke sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD.

      - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dari pagu awal *Rp.15.000.000* menjadi *Rp.24.720.000* penambahan anggaran untuk tambahan koordinasi dan penyusunan laporan keuangan.

c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;

- Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya dari pagu awal *Rp.300.655.871* menjadi *Rp.303.455.871* penambahan anggaran untuk honor PPK.
- Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi pagu tetap *Rp.70.000.000,* perubahan uraian belanja untuk pelatihan dan bimtek.

d. Administrasi Umum Perangkat Daerah;

- Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dari pagu awal *Rp.320.042.787* menjadi *Rp.321.642.787* penambahan anggaran untuk honor PPK.
- Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor dari pagu awal *Rp.100.000.000* menjadi *Rp.101.650.000* penambahan anggaran untuk honor PPK.
- Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dari pagu awal *Rp.100.000.000* menjadi *Rp.150.000.000* dikarekan anggaran sub kegiatan ini sudah terealisasi semua, anggaran bertambah unutk penyesuaian rapat koordinasi dan konsultasi ataupun undangan luar daerah.

e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, di Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya dari pagu awal *Rp.616.120.353* menjadi *Rp.621.120.353* penambahan anggaran untuk honor PPK.

f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;

- Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dari pagu awal *Rp.165.210.600* menjadi *Rp.166.160.600* penambahan anggaran untuk honor PPK.
- Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dari pagu awal *Rp.278.441.402* menjadi *Rp.279.391.402* penambahan anggaran untuk honor PPK.
- Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya dari pagu awal *Rp.58.797.000* menjadi *Rp.68.797.000* penambahan anggaran untuk pemeliharaan peralatan dan mesin yang belum tercover atau teranggarkan.

- Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dari pagu awal *Rp.122.609.895* menjadi *Rp.37.595.078*, anggaran terkena Rasionalisasi belanja.

2. **PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA**, yaitu :

a. Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota, di Sub Kegiatan Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota dari pagu awal Rp.179.989.272 menjadi Rp.206.489.272 penambahan anggaran untuk uang transpot peserta FGD.

b. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana;

- Sub kegiatan Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan dari pagu awal *Rp. 50.000.000* menjadi *Rp.44.925.080,* anggaran terkena Rasionalisasi belanja.

- Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota dari pagu awal *Rp.169.150.489* menjadi *Rp.95.201.006,* anggaran terkena Rasionalisasi belanja.

- Sub Kegiatan Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana pagu awal *Rp.535.815.516*
- menjadi *Rp.331.433.016,* anggaran terkena Rasionalisasi belanja
- Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana pagu awal *Rp.20.000.000* menjadi *Rp.0,* anggaran terkena Rasionalisasi belanja.

c. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana;

- Sub Kegiatan Respon Cepat Darurat Bencana kabupaten/Kota dari pagu awal *Rp.377.700.000* menjadi *Rp.477.700.000* penambahan anggaran untuk penanganan kebencanaan.

- Sub Kegiatan Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota dari pagu awal *Rp.250.000.000* menjadi *Rp.286.000.000* penambahan anggaran untuk penanganan kebencanaan dan perubahan uraian untuk pelatihan dan bimtek personil TRC.

- Sub Kegiatan Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota dari pagu awal *Rp.345.000.000* menjadi *Rp.474.000.000* penambahan anggaran untuk operasional pendistribusian logistik dan bantuan pengiriman air bersih untuk daerah kekeringan.

d. Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana

- Sub Kegiatan Penguatan Kelembagaan Bencana kabupaten/Kota dari pagu awal *Rp.140.300.000* menjadi *Rp.162.800.000* penambahan anggaran untuk penyusunan regulasi BPBD.
- Sub Kegiatan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota dari pagu awal *Rp.88.216.146* menjadi *Rp.77.007.146,* anggaran terkena Rasionalisasi belanja.
- Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dari pagu awal *Rp.190.000.000* menjadi *Rp.128.500.000,* anggaran terkena Rasionalisasi belanja.

Total kebutuhan dana/pagu indikatif untuk keseluruhan program dan kegiatan sebagaimana di atas dari ***Rp.13.412.994.189 (Tiga Belas Milyar Empat Ratus Dua Belas Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Seratus Delapan Puluh Sembilan Rupiah)*** menjadi sebesar ***Rp. 13.195.156.952* (*Tiga Belas Milyar Seratus Sembilan Puluh Lima Juta Seratus Lima Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Dua Rupiah)*** yang keseluruhannya dibiayai oleh APBDP Kota Cilegon TA. 2023.

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja dan Pendanaan Kota Cilegon Tahun 2023 disajikan pada Tabel berikut ini :

RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKPA-BELANJA SKPD
Pemerintah Kota Cilegon Tahun Anggaran 2023	

Organisasi : 1.05.0.00.0.00.04.0000 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

REKAPITULASI PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah											
								T-1	T (Sebelum Perubahan)					T (Sesudah Perubahan)					Bertambah/ (Berkurang)	T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20	21
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**															
1	**05**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**				**12,700,377,788**	**712,616,401**	**0**	**0**	**13,412,994,189**	**12,520,715,967**	**674,440,985**	**0**	**0**	**13,195,156,952**	**(217.837.237)**	
1	**05**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**				**9,902,920,830**	**615,927,922**	**0**	**0**	**10,518,848,752**	**9,833,400,013**	**615,927,922**	**0**	**0**	**10,449,327,935**	**(69.520.817)**	
1	**05**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**				**126,585,956**	**0**	**0**	**0**	**126,585,956**	**69,129,956**	**0**	**0**	**0**	**69,129,956**	**(57.456.000)**	
1	05	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Cilegon, Jombang, Sukmajaya		103,589,224	0	0	0	103,589,224	46,133,224	0	0	0	46,133,224	(57.456.000)	
1	05	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Cilegon, Jombang, Sukmajaya		2,498,000	0	0	0	2,498,000	2,498,000	0	0	0	2,498,000	0	
1	05	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Cilegon, Jombang, Sukmajaya		2,000,000	0	0	0	2,000,000	2,000,000	0	0	0	2,000,000	0	
1	05	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD (BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Cilegon, Jombang, Sukmajaya		2,999,732	0	0	0	2,999,732	2,999,732	0	0	0	2,999,732	0	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah										
								T-1	T (Sebelum Perubahan)					T (Sesudah Perubahan)					Bertambah/ (Berkurang)	T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20	21
1	05	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD (BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Cilegon, Jombang, Sukmajaya		2,499,000	0	0	0	2,499,000	2,499,000	0	0	0	2,499,000	0	
1	05	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Cilegon, Jombang, Sukmajaya		10,000,000	0	0	0	10,000,000	10,000,000	0	0	0	10,000,000	0	
1	05	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Cilegon, Jombang, Sukmajaya		3,000,000	0	0	0	3,000,000	3,000,000	0	0	0	3,000,000	0	
1	**05**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**				**6,028,692,823**	**0**	**0**	**0**	**6,028,692,823**	**6,028,692,823**	**0**	**0**	**0**	**6,028,692,823**	**0**	
1	05	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Cilegon, Jombang, Sukmajaya		5,939,772,823	0	0	0	5,939,772,823	5,939,772,823	0	0	0	5,939,772,823	0	
1	05	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Cilegon, Jombang, Sukmajaya		73,920,000	0	0	0	73,920,000	64,200,000	0	0	0	64,200,000	(9.720.000)	
1	05	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD (BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Cilegon, Jombang, Sukmajaya		15,000,000	0	0	0	15,000,000	24,720,000	0	0	0	24,720,000	9.720.000	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah											
								T-1	T (Sebelum Perubahan)					T (Sesudah Perubahan)					Bertambah/ (Berkurang)	T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20	21
1	**05**	**01**	**2.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**				**18,000,000**	**0**	**0**	**0**	**18,000,000**	**18,000,000**	**0**	**0**	**0**	**18,000,000**	**0**	
1	05	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Cilegon, Jombang, Sukmajaya		18,000,000	0	0	0	18,000,000	18,000,000	0	0	0	18,000,000	0	
1	**05**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**				**377,655,871**	**0**	**0**	**0**	**377,655,871**	**380,455,871**	**0**	**0**	**0**	**380,455,871**	**2.800.000**	
1	05	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya (BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Cilegon, Jombang, Sukmajaya		300,655,871	0	0	0	300,655,871	303,455,871	0	0	0	303,455,871	2.800.000	
1	05	01	2.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Cilegon, Jombang, Sukmajaya		2,500,000	0	0	0	2,500,000	2,500,000	0	0	0	2,500,000	0	
1	05	01	2.05	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian (BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Cilegon, Jombang, Sukmajaya		2,500,000	0	0	0	2,500,000	2,500,000	0	0	0	2,500,000	0	
1	05	01	2.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Cilegon, Jombang, Sukmajaya		2,000,000	0	0	0	2,000,000	2,000,000	0	0	0	2,000,000	0	
1	05	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi (BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			70,000,000	0	0	0	70,000,000	70,000,000	0	0	0	70,000,000	0	
1	**05**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**				**607,269,285**	**0**	**0**	**0**	**607,269,285**	**660,519,285**	**0**	**0**	**0**	**660,519,285**	**53.250.000**	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah										
								T-1	T (Sebelum Perubahan)					T (Sesudah Perubahan)					Bertambah/ (Berkurang)	T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20	21
1	05	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Cilegon, Jombang, Sukmajaya		9,226,498	0	0	0	9,226,498	9,226,498	0	0	0	9,226,498	0	
1	05	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Cilegon, Jombang, Sukmajaya		320,042,787	0	0	0	320,042,787	321,642,787	0	0	0	321,642,787	1.600.000	
1	05	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga (BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Cilegon, Jombang, Sukmajaya		18,000,000	0	0	0	18,000,000	18,000,000	0	0	0	18,000,000	0	
1	05	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor (BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Cilegon, Jombang, Sukmajaya		100,000,000	0	0	0	100,000,000	101,650,000	0	0	0	101,650,000	1.650.000	
1	05	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan (BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Cilegon, Jombang, Sukmajaya		25,000,000	0	0	0	25,000,000	25,000,000	0	0	0	25,000,000	0	
1	05	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan (BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Cilegon, Jombang, Sukmajaya		15,000,000	0	0	0	15,000,000	15,000,000	0	0	0	15,000,000	0	
1	05	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu (BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Cilegon, Jombang, Sukmajaya		20,000,000	0	0	0	20,000,000	20,000,000	0	0	0	20,000,000	0	
1	05	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dana Transfer Umum-Dana	Kota Cilegon,		100,000,000	0	0	0	100,000,000	150,000,000	0	0	0	150,000,000	50.000.000	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah											
								T-1	T (Sebelum Perubahan)					T (Sesudah Perubahan)					Bertambah/ (Berkurang)	T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20	21
					(BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH)	Alokasi Umum	Jombang, Sukmajaya													
1	**05**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**				**192,431**	**615,927,922**	**0**	**0**	**616,120,353**	**5,192,431**	**615,927,922**	**0**	**0**	**621,120,353**	**5.000.000**	
1	05	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya (BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Cilegon, Jombang, Sukmajaya		192,431	615,927,922	0	0	616,120,353	5,192,431	615,927,922	0	0	621,120,353	5.000.000	
1	**05**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**2,119,465,567**	**0**	**0**	**0**	**2,119,465,567**	**2,119,465,567**	**0**	**0**	**0**	**2,119,465,567**	**0**	
1	05	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat (BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Cilegon, Jombang, Sukmajaya		6,000,000	0	0	0	6,000,000	6,000,000	0	0	0	6,000,000	0	
1	05	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Cilegon, Jombang, Sukmajaya		223,862,127	0	0	0	223,862,127	223,862,127	0	0	0	223,862,127	0	
1	05	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Cilegon, Jombang, Sukmajaya		1,889,603,440	0	0	0	1,889,603,440	1,889,603,440	0	0	0	1,889,603,440	0	
1	**05**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**625,058,897**	**0**	**0**	**0**	**625,058,897**	**551,944,080**	**0**	**0**	**0**	**551,944,080**	**(73.114.817)**	
1	05	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan (BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Cilegon, Jombang, Sukmajaya		165,210,600	0	0	0	165,210,600	166,160,600	0	0	0	166,160,600	950.000	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah										
								T-1	T (Sebelum Perubahan)					T (Sesudah Perubahan)					Bertambah/ (Berkurang)	T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20	21
1	05	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Cilegon, Jombang, Sukmajaya		278,441,402	0	0	0	278,441,402	279,391,402	0	0	0	279,391,402	950.000	
1	05	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Cilegon, Jombang, Sukmajaya		58,797,000	0	0	0	58,797,000	68,797,000	0	0	0	68,797,000	10.000.000	
1	05	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Cilegon, Jombang, Sukmajaya		122,609,895	0	0	0	122,609,895	37,595,078	0	0	0	37,595,078	(85.014.817)	
1	**05**	**03**			**PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA**				**2,797,456,958**	**96,688,479**	**0**	**0**	**2,894,145,437**	**2,687,315,954**	**58,513,063**	**0**	**0**	**2,745,829,017**	**(148.316.420)**	
1	**05**	**03**	**2.01**		**Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota**				**279,989,272**	**0**	**0**	**0**	**279,989,272**	**306,489,272**	**0**	**0**	**0**	**306,489,272**	**26.500.000**	
1	05	03	2.01	01	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota (BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Cilegon, Jombang, Sukmajaya		179,989,272	0	0	0	179,989,272	206,489,272	0	0	0	206,489,272	26.500.000	
1	05	03	2.01	02	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) (BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Cilegon, Jombang, Sukmajaya		100,000,000	0	0	0	100,000,000	100,000,000	0	0	0	100,000,000	0	
1	**05**	**03**	**2.02**		**Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana**				**944,408,355**	**55,557,650**	**0**	**0**	**999,966,005**	**554,800,935**	**55,557,650**	**0**	**0**	**610,358,585**	**(389.607.420)**	
1	05	03	2.02	02	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	Dana Transfer Umum-Dana	Kota Cilegon,		75,000,000	0	0	0	75,000,000	75,000,000	0	0	0	75,000,000	0	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah											
								T-1	T (Sebelum Perubahan)					T (Sesudah Perubahan)					Bertambah/ (Berkurang)	T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20	21
					Kabupaten/Kota (BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH)	Alokasi Umum	Jombang, Sukmajaya													
1	05	03	2.02	04	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana (BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Cilegon, Jombang, Sukmajaya		14,442,350	55,557,650	0	0	70,000,000	14,442,350	55,557,650	0	0	70,000,000	0	
1	05	03	2.02	05	Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota (BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Cilegon, Jombang, Sukmajaya		50,000,000	0	0	0	50,000,000	50,000,000	0	0	0	50,000,000	0	
1	05	03	2.02	06	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan (BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Cilegon, Jombang, Sukmajaya		50,000,000	0	0	0	50,000,000	44,925,080	0	0	0	44,925,080	(5.074.920)	
1	05	03	2.02	07	Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota (BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Cilegon, Jombang, Sukmajaya		30,000,000	0	0	0	30,000,000	30,000,000	0	0	0	30,000,000	0	
1	05	03	2.02	08	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota (BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Cilegon, Jombang, Sukmajaya		169,150,489	0	0	0	169,150,489	9,000,489	0	0	0	9,000,489	(160.150.000)	
1	05	03	2.02	10	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana (BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Cilegon, Jombang, Sukmajaya		535,815,516	0	0	0	535,815,516	331,433,016	0	0	0	331,433,016	(204.382.500)	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah										
								T-1	T (Sebelum Perubahan)					T (Sesudah Perubahan)					Bertambah/ (Berkurang)	T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20	21
1	05	03	2.02	11	Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Cilegon, Jombang, Sukmajaya		20,000,000	0	0	0	20,000,000	0	0	0	0	0	(20.000.000)	
1	**05**	**03**	**2.03**		**Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana**				**1,031,569,171**	**41,130,829**	**0**	**0**	**1,072,700,000**	**1,334,744,587**	**2,955,413**	**0**	**0**	**1,337,700,000**	**265.000.000**	
1	05	03	2.03	01	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas (BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Cilegon, Jombang, Sukmajaya		50,000,000	0	0	0	50,000,000	50,000,000	0	0	0	50,000,000	0	
1	05	03	2.03	02	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota (BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Cilegon, Jombang, Sukmajaya		377,700,000	0	0	0	377,700,000	477,700,000	0	0	0	477,700,000	100.000.000	
1	05	03	2.03	03	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota (BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Cilegon, Jombang, Sukmajaya		208,869,171	41,130,829	0	0	250,000,000	283,044,587	2,955,413	0	0	286,000,000	36.000.000	
1	05	03	2.03	04	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota (BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Cilegon, Jombang, Sukmajaya		345,000,000	0	0	0	345,000,000	474,000,000	0	0	0	474,000,000	129.000.000	
1	05	03	2.03	05	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana (BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Cilegon, Jombang, Sukmajaya		30,000,000	0	0	0	30,000,000	30,000,000	0	0	0	30,000,000	0	
1	05	03	2.03	06	Respon Cepat Bencana Non Alam	Dana Transfer Umum-Dana	Kota Cilegon,		20,000,000	0	0	0	20,000,000	20,000,000	0	0	0	20,000,000	0	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah										
								T-1	T (Sebelum Perubahan)					T (Sesudah Perubahan)					Bertambah/ (Berkurang)	T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20	21
					Epidemi/Wabah Penyakit (BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH)	Alokasi Umum	Jombang, Sukmajaya													
1	**05**	**03**	**2.04**		**Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana**				**541,490,160**	**0**	**0**	**0**	**541,490,160**	**491,281,160**	**0**	**0**	**0**	**491,281,160**	**(50.209.000)**	
1	05	03	2.04	02	Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota (BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Cilegon, Jombang, Sukmajaya		140,300,000	0	0	0	140,300,000	162,800,000	0	0	0	162,800,000	22.500.000	
1	05	03	2.04	03	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota (BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Cilegon, Jombang, Sukmajaya		88,216,146	0	0	0	88,216,146	77,007,146	0	0	0	77,007,146	(11.209.000)	
1	05	03	2.04	04	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan (BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Cilegon, Jombang, Sukmajaya		122,974,014	0	0	0	122,974,014	122,974,014	0	0	0	122,974,014	0	
1	05	03	2.04	05	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Cilegon, Jombang, Sukmajaya		190,000,000	0	0	0	190,000,000	128,500,000	0	0	0	128,500,000	(61.500.000)	

BAB V
PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja (Renja) menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan penanggulangan bencana daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku-pelaku (*stakeholders*) dalam menciptakan *Good Governance* sesuai dengan tuntutan paradigma baru penanggulangan bencana.

Output Perubahan Rencana Kerja BPBD Kota Cilegon adalah Program Tahunan BPBD Kota Cilegon yang sesuai dengan Tupoksi dan sasaran Program BPBD Kota Cilegon. Perubahan Rencana Kerja BPBD Kota Cilegon selain menjadi pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2023 berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja BPBD Kota Cilegon. Sebagai bahan pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2023, Renja Perubahan juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan dan seluruh staf BPBD Kota Cilegon sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja kearah yang lebih baik. Dokumen Perubahan Rencana Kerja (Renja) Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Disamping sebagai bahan untuk penyusunan rencana pembangunan jangka pendek Kota Cilegon juga sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan (RKA.P) BPBD Tahun 2023.

Demikian Rencana Kerja (Renja) Perubahan Badan Penanggulangan Bencana Daerah disusun secara Objektif dengan mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 serta semoga dapat bermanfaat.

Cilegon, Agustus 2023
Plt. Kepala Pelaksana
BPBD Kota Cilegon

Drs. AGUS UBAIDILLAH, MM
NIP. 19720808 200212 1 007